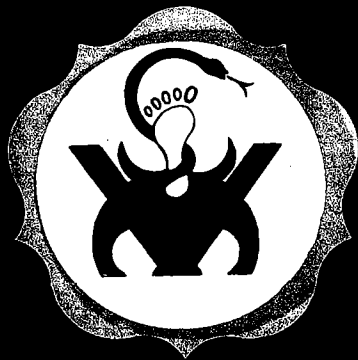




VELABO

(VETERINARY LABORATORY)

VOLUME : X

NOMOR : 01

TRIWULAN: I TAHUN 1993 / 1994

**Informasi
Kesehatan
Hewan**

**Diterbitkan
Tiap 3 bulan**

**Untuk
Kalangan
Sendiri**

DAFTAR ISI

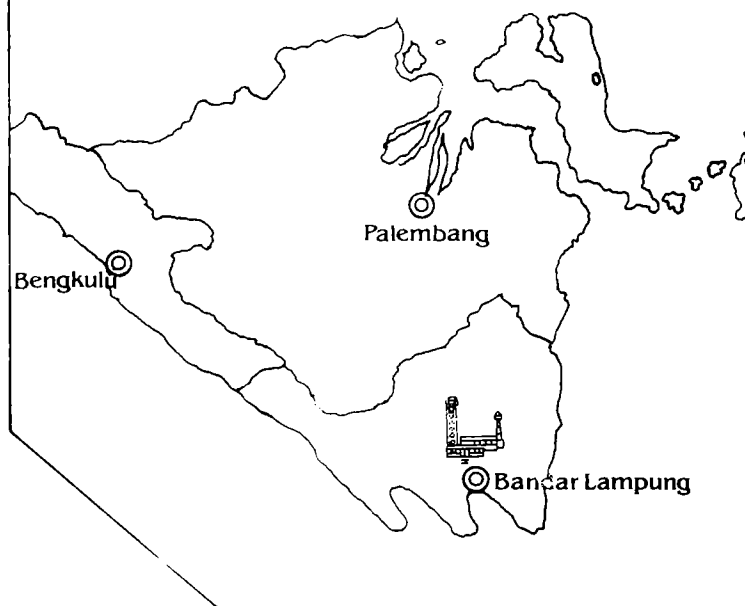
* Pengantar Redaksi

* Tinjauan tentang
Babesiosis di
Lampung, Sumatera
Selatan dan
Bengkulu

F. X. Soesilo

Peta Wilayah Pelayanan BPPH Wilayah III

Bandar Lampung



* Laporan Evaluasi Balai Penyidikan Penyakit
Hewan Wilayah III dan Sistem Informasi
Wilayah

Sobari

**BALAI PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN WILAYAH III
BANDAR LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DEPARTEMEN PERTANIAN**

DEWAN REDAKSI

Ketua Sobari
Anggota Sri Marfiatiningsih
 Hadi Prabowo
 Darman Husin
 Agus Sulistiyono
 A.M. Tantri Proboraras
 Mardiatmi

Redaksi Pelaksana

Ketua : Agus Sulistiyono
Anggota : Agus Mardihartono
 Kurniadi
 Agus Purwanto
 Rachmad. S
 M. Tumisih
 Haryani
 Endang Suciani

Alamat : Balai Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah III
 Jl. Untung Suropati No.2 Tilpon (0721) 71851
 Bandar Lampung 35142



Kata Pengantar

1993/1994
No. 1
Hal. 1

Dalam VELABO Nomor 1 Triwulan I tahun 1993/1994 ini dimuat 2 tulisan.

Pertama, berjudul Tinjauan tentang Babesiosis di Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu oleh Drh. FX. Soesilo.

Kedua, berupa Laporan Evaluasi BPPH III dan Sistem Informasi Wilayah oleh Drh. Sobari, M.Sc. di mana dievaluasi kegiatan BPPH III selama Pelita V (s/d 30 Juni 1993) yang secara kualitatif diringkas dalam sub judul Kesimpulan dan secara kuantitatif diringkas dalam tabel 1 dan 2. Sub judul Saran merupakan rencana kegiatan BPPH III dalam Pelita VI secara kualitatif.

Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua.



Redaksi

TINJAUAN TENTANG BABESIOSIS DI LAMPUNG, SUMATERA SELATAN DAN BENGKULU

F.X. Soesilo

SUMMARY

There have been reported the occurrence of Babesiosis in Lampung, Sumatera Selatan and Bengkulu. The data by cattle in Lampung were 274, 155, 54, 10, 28, 82, 82 and 69 heads, respectively in 1976/1977 to 1983/1984, were nil in 1984/1985 and 1987/1988, by buffaloes were 136 and 38 head in 1976/1977 and 1977/1978 and 22 and 219 head in 1983/1984 and 1984/1985, respectively, and one goat in 1977/1978. Positive cases were reported by cattle from Sumatera Selatan in 1980/1981 to 1986/1987 and nil in 1987/1988. Cases by cattle in Bengkulu were nil in 1979/1980 and 1981/1982 to 1984/1985, 97 and 13 head in 1980/1981 and 1985/1986, respectively, and 4 and 77 head of buffaloes in 1985/1987 and 1985/1986, respectively.

Blood samples were collected at random from 20.237 cattle and 3.275 buffaloes in three provinces. From the blood samples were made Giemsa stained thin smears had examined under the microscope x 100 objective with immersion oil. The results showed that the prevalence rate of Babesia sp by cattle in Lampung was 0.76% in 1979/1980 and nil in 1980/1981 to 1989/1990; 100% (2 head) by frisien holstein in 1981/1982 and nil in 1979/1980 and 1980/1981 and 1982/1983 to 1989/1990, and 100% (1 head) in Bengkulu in 1984/1985 and nil in 1979/1980 to 1983/1984 and 1985/1986 to 1989/1990. The results were thoroughly nil by buffaloes from 1978/1980 to 1989/1990.

PENDAHULUAN

Babesiosis atau demam caplak sapi disebabkan oleh Babesia spp yang menyerang sapi, domba, kambing dan kuda. Ciri penyakit ini ditandai dengan adanya demam, hemolisis intravaskuler yang menyebabkan sindrom anemia, hemoglobinemia dan hemoglobinuria. Penularan penyakit dengan perantara caplak parasit darah (Blood, Radostits and Henderson, 1983).

Di Indonesia Babesiosis pada ruminansia pertama kali ditemukan oleh De Does (Ressang, 1964) pada kerbau di Tegal, Jawa Tengah pada tahun 1896, pada sapi di Sumatera pada tahun 1906. Dalam tahun 1918 ditemukan pada sapi yang diimport dari Australia yang diinfeksi oleh Babesia divergens. Penyebab penyakit yang menyerang ruminansia adalah B. bigemina, B. argentina dan B. divergens, sedangkan pada kuda diduga keras oleh B. caballi (Ditjennak, 1980).

Maksud tulisan ini adalah untuk meninjau sejauh mana keberadaan (endemisitas, prevalensi) Babesiosis di Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu, karena sinyalemen penyakit ini sudah cukup lama adanya di Sumatera sebagai salah satu daerah tertular.

BAHAN DAN METODA

Bahan dikumpulkan dari Laporan Tahunan Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (1976/1977 - 1987/1988), Sumatera Selatan (1980/1981 - 1987/1988) dan Bengkulu (1979/1980 - 1985/1986); hasil pemeriksaan spesimen asal ketiga propinsi tersebut tahun 1979/1980 - 1988/1989 serta di dukung oleh berbagai rujukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tabel 1 disajikan kejadian Babesiosis berasal dari Laporan Tahunan Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Data kejadian sakit dari Lampung pada sapi tahun 1976/1977 - 1983/1984 masing-masing sebanyak 274, 155, 54, 10, 28, 82, 82, 69 ekor, dari tahun 1984/1985 - 1987/1988 tidak ada laporan (nihil ?), pada kerbau tahun 1976/1977 - 1977/1978 masing-masing 136 dan 38 ekor dan 1983/1984 - 1984/1985 sebanyak 22 dan 219 ekor, dan 1 ekor kambing pada tahun 1977/1978, Sumatera Selatan melaporkan ada kasus pada sapi, tanpa angka, yang terjadi dalam tahun 1980/1981 - 1986/1987 dan nihil dalam tahun 1987/1988, dan Bengkulu : pada sapi ada kasus tanpa angka pada tahun 1979/1980, 1981/1982-1984/1985 dan masing masing 97 dan 13 ekor pada tahun 1980/1981 dan 1985/1986, pada kerbau masing-masing 4 dan 77 ekor pada tahun 1980/1981 dan 1985/1986.

Tampak dari laporan ini, Sumatera Selatan belum pernah melapor adanya kasus secara jelas (dengan angka). Bengkulu hanya dua kali jadi tidak konsisten. Laporan kejadian penyakit dan kejadian kematian adalah merupakan bagian darah kegiatan Epidemiologik, yang harus diterangkan secara jelas dengan angka. Memperhatikan laporan dari ketiga Propinsi tersebut, rata-rata Epidemiologi masih jauh dari yang dilaporkan.

Genus Babesia terutama menginfeksi sapi, kerbau, kuda dan anjing, dapat juga menyerang kambing dan hewan liar. Hewan yang rentan ialah sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, keledai, anjing, kucing dan hewan liar. Kerentanan ini dipengaruhi faktor bangsa dan umur (Ditjennak, 1980). Ressang (1962) mengemukakan bahwa Babesiosis pada kambing belum pernah dilaporkan kejadiannya pada kambing dan domba. Jadi laporan adanya kasus Babesiosis pada seekor kambing, bukanlah mustahil ada, namun perlu dipelajari lebih lanjut secara seksama (Epidemiologinya, cara penularan, prevalensi) melalui penyidikan ataupun survei. Hal ini ini perlu untuk menegakkan cara pendiagnosaan di lapangan, sekalipun bersifat sementara dan peneguhan diagnosa oleh Laboratorium Kesehatan Hewan yang berwenang.

Banyaknya sampel ulas darah yang dari tahun 1979/1980 - 1989/1990 adalah sapi 20.237 sampel, kerbau 3.275 sampel yang diperiksa di BPPH III dan hasilnya positif ditemukan Babesia sp adalah sebagai berikut: Lampung, 10 sampel sapi pada tahun 1979/1980, dan nihil pada 1980/1981-1988/1989: Sumatera Selatan, 2 sampel sapi pada tahun 1981/1982 dan nihil pada tahun 1982/1983-1988/1989, dan Bengkulu, 1 sampel sapi pada tahun 1984/1985, dan nihil per tahun 1985/1986 - 1988/1989 (Tabel 2). Kerbau nihil sama sekali (Tabel 3).

Memperhatikan Tabel 2 dan tabel 3, mudah diduga bahwa seperti tidak ada konfirmasi diagnosa dari kasus-kasus lapangan yang terjadi (Tabel 1).

Spesimen lapangan yang diperiksa Balai tahun 1979/1980 (Lampung), 1987/1988 (Sumatera Selatan) dan 1984/1985 (Bengkulu) adalah Spesimen yang dikumpulkan melalui pelayanan aktif Balai yang tidak semata-mata ditujukan pada Babesiosis. Kejadian kasus di lapangan demikian banyak tabel 1 (lepas dari pada diagnosanya tepat atau cermat), namun tidak dibarengi dengan laporan kasus ke Laboratorium Kesehatan Hewan yang berwenang, maka dalam kasus Babesiosis ini fungsi Laboratorium tenggelam. Bisa jadi ada anggapan (di lapangan) bahwa kasus itu tidak serius, tidak ada kematian dan mudah diatasi dengan pengobatan, sehingga konfirmasi ke laboratorium tidak diperlukan.

Jikalau di lapangan masih ada anggapan semacam itu (kemungkinan), maka banyak kasus penyakit lainpun tidak akan melalui prosedur pencegahan. Mengingat Babesiosis adalah penyakit Hewan menular yang dapat menimbulkan kerugian karena penurunan berat badan, penurunan produksi susu, penurunan produksi tenaga, kematian dengan tidak dapat dimanfaatkan kerbau dirumah potong hewan (Ditjennak, 1980), dengan kedudukan Laboratorium kesehatan hewan regional (Type A) maupun lokal (Type B dan C), maka prosedur pencegahan diagnosa tidak dapat dilewatkan begitu saja, betapapun alasan atau faktor-faktor keterbatasan yang ditemukan di lapangan, yakni pemberitahuan (pelaporan) dalam kesempatan dini dan atau pengiriman spesimen ke laboratorium adalah esensi. Dengan demikian tindakan administratif, pencegahan dan pengobatan akan dapat dilakukan secara tepat dan seksama.

Patogenesis penyakit ini adalah bila hewan diinfeksi oleh parasit dialami, maka parasit akan berkembang biak dalam pembuluh darah feriferal dan viseral. Perkembangan biak parasit mencapai puncaknya ditandai dengan perkembangan hemolisis yang dapat dikenali sesudah masa inkubasi 7-20 hari. Hemolisis ini menghasilkan tampaknya tanda klinis seperti anemia, ikterus (Jaundice) dan hemoglobinuria kematian terjadi karena Anoxia yang anemik. Jika hewan penderita ini dapat hidup, maka mereka akan menjadi karier yang berbahaya, karena infeksi sub klinis dipelihara oleh keseimbangan imunologik yang baik antara parasit dengan zat kebal. Keseimbangan ini akan rusak oleh stres terutama transport makanan yang kurang dan adanya penyakit lain (infeksi sekunder). Resistensi hewan karier terkadang penyakit kurang lebih 1 tahun (Blood dkk, 1983).

Rujukan lain menunjukkan tanda klinis penyakit antara lain demam tinggi, ikterus, anemis, dispuoe yang frekwen, gejala syarat yang dapat terjadi, kadang-kadang dapat terjadi diare atau sebaliknya konstipasi dengan warna tinja coklat kekuningan, Emasiassi, kondisi menurun dan dapat diikuti oleh adanya kematian. Anak sapi umur kurang dari 1 tahun penyakitnya ringan, umur lebih dari 1 tahun penyakitnya dapat hebat dan akut. Di Indonesia Babesia bigemina dapat menimbulkan kematian 80-90% pada ternak dewasa yang tidak diobati dan pada ternak umur 1-2 tahun kematian mencapai 10-15% (Ditjennak, 1980).

Apakah di lapangan tanda klinis dapat diamati seperti yang tertera dalam rujukan, tidak dapat dikemukakan disini, karena tidak ada petunjuk atau indikasi ke arah itu dalam laporan berasal dari Dinas Peternakan masing-masing Propinsi. Bahkan peneguhan diagnosa kepada laboratorium kesehatan yang berwewenang hampir tidak ada. Maka dari laporan dinas tersebut tidak diketahui prosentase atau laju morbiditas, mortalitas maupun prevelensinya. Bagaimana sekalipun masih ada kekurangan dalam laporan itu, apabila angka-angka kejadian penyakit yang di laporkan oleh Lampung, Bengkulu dan laporan kejadian penyakit tanpa angka oleh Sumatera Selatan itu dianggap saja benar karena Babesiosis, maka munculnya kasus penyakit di Sumatera Selatan, Bengkulu berarti bahwa seluruh Sumatera adalah merupakan daerah tertular penyakit (endemis). Karena sebelum munculnya penyakit di Sumatera Selatan dan Bengkulu ini Ditjennak (1980) mengemukakan bahwa daerah tertular Babesiosis di Indonesia adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Halmahera, Irian Jaya, Lombok, Bali di Jawa adalah daerah lain belum ada laporan.

Penyebab Babesiosis pada ternak sapi dan kerbau di Indonesia antara lain adalah *B. bigemina*. Anak-anak sapi di daerah endemik biasanya sudah mempunyai zat kebal foetal dan maternal. Dengan bertambahnya umur hewan, kepekaan terhadap penyakit akan meningkat. Penderita yang sembuh setelah diobati akan memperoleh kekebalan minimal selama 1 (satu) tahun (Deddy Djohari Siswansyah 1990).

Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu adalah merupakan daerah penyebaran dan pengembangan terutama sapi bali samping bangsa-bangsa sapi atau kerbau yang lain. Kejadian Babesiosis selalu ada setiap tahun, namun tidak diketahui angka prevalensinya.

Deddy Djauhari Siswansyah (1990) mengatakan bahwa angka prevalensi *B. bigemina* pada sapi bali lebih tinggi dari pada sapi peranakan ongol, dan Djaenoedin (1959) melaporkan sapi bali di Madura jarang diserang oleh piroplasmosis. Bagaimanapun laporan dalam angka serta parameter Epidemiologik tidak dapat diabaikan begitu saja terhadap setiap timbulnya penyakit hewan menular. Karena hal tersebut merupakan hal-hal yang esensial dalam menunjang manajemen pengamanan ternak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Adanya Babesiosis di Sumatera Selatan dan Bengkulu, maka seluruh Sumatera menjadi daerah tertular (endemis).

Pemanfaatan parameter Epidemiologik belum sepenuhnya dipakai oleh laporan kesehatan hewan oleh Dinas Peternakan.

Karena Dinas Peternakan adalah merupakan dinas penyuluhan sekaligus sebagai tempat informasi antara lain dibidang kesehatan hewan, maka dalam setiap laporan kesehatan hewan khususnya dari sumber informasi (kejadian penyakit di lapangan) atau perangkat teknis paling bawah (Dinas Peternakan Kecamatan) adalah merupakan keharusan bahwa laporan keatas itu harus dapat dipercaya, up to date, cermat dan jelas (dengan angka) yang mana berkaitan dengan kaidah-kaidah pelapor ternak parameter epidemiologi yang tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan.

Setiap kejadian penyakit hewan menular di lapangan, pencegahan diagnosa perlu dilakukan kepada Laboratorium Kesehatan Hewan yang berwenang (BPPH).

Dinas Peternakan Propinsi tidak melewatkan begitu saja BPPH dalam alokasi laporan tahunan maupun laporan-laporan lainnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan hewan, sehingga balai yang mempunyai fungsi penunjang akan dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Balai perlu mempelajari lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan kejadian penyakit yang dilaporkan oleh Dinas Peternakan, dengan maksud mengenali genus parasit serta aspek-aspek epidemiologik yang lain. Dengan demikian peta penyakit akan berarti atau memiliki kualitas epidemiologik informatif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Blood, D.C, O.M. Radostits and JA. Henderson, 1983. Veterinary Medicine. Textbook of the disease of cattle, sheep, pigs, goats and horses. Sixth edition. ELBS. The English Language Book Society and Bailliere Tindall. p. 871.
2. Ditjennak, 1980. Pedoman Pengendalian Penyakit Hewan Menular. Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta. Jilid II. h. 115 - 122.
3. Ressang, A.A., 1982. Patologi khusus veteriner. Edisi kedua.
4. Deddy Djauhari Siswansyah. 1990. Prevalensi Theileriosis, Babesiosis dan Anaplasmosis pada sapi dan kerbau di Kalimantan Selatan. Penyakit Hewan. Vol. XXII No. 39 Semester I th 1990. h. 50 - 54.

Tabel 1. Kejadian Babesiosis pada Hewan di Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu

P	T	Lampung			Sumatera Selatan			Bengkulu			Jumlah		
		S	K	Ki	S	K	Ki	S	K	Ki	S	K	Ki
	1976/1977	274	136								274	136	
	1977/1978	155	38	1							155	38	1
	1978/1979	54	-								54	-	
	1979/1980	10	-		+			+			10	-	
	1980/1981	28	-		+			97	4		125	4	
	1981/1982	82	-		+			?			82	-	
	1982/1983	69	22		+			+			69	22	
	1984/1985	-	219		+			+			-	219	
	1985/1986				+			13	77		13	77	
	1986/1987				+								
	1987/1988				-								

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Peternakan Propinsi Dati I

+ LT ada, jumlah hewan, tidak dilaporkan

+ LT ada, jumlah kasus tidak dilaporkan

? LT tidak diterima

Tabel 2. Banyaknya sampel sapi* yang terinfeksi Babesia sp di wilayah III** dalam tahun 1979/1980 - 1989/1990

P	T	Wilayah III Jumlah sapi yang diperiksa + Ba (ekor)	Lampung (ekor)(%)	Jumlah + Ba Sum. Sel. Bengkulu (ekor)(%)	Keterangan
III	1979/1980	1306	10 (0.76)	-	*) Sampel berupa ulas darah Berbagai bangsa sapi yang diperik: diperiksa : Bali, Ongol, Peranak: Ongol, Brahman cross, Santa getrudis: Frusein holstein, Lemosin, Herford: Madura, Lokal (Jawi)
	1980/1981	2080	-	-	
	1981/1982	3130	-	2(100)**	
	1982/1983	4198	-	-	
	1983/1984	2029	-	-	
IV	1984/1985	1786	-	1(100)	**) Wilayah III : Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu *) Sapi Frisien holstein +B - Positip terinfeksi Babesia sp L - Lampung SS - Sumatera Selatan B - Bengkulu () - Banyaknya sampel tidak diketahui sehingga tidak dapat dihitung persentasenya P - Tahun Repelita T - Tahun Kegiatan Proyek
	1985/1986	1019	-	-	
	1986/1987	509	-	-	
	1987/1988	682	-	-	
	1988/1989	1657	-	-	
V	1989/1990	1791	-	-	
	Jumlah	20237			

Sumber : Laporan Tahunan BPPH III

Tabel 3. Banyaknya sampel kerbau yang terinfeksi Babesia sp di wilayah III** dalam tahun 1979/1980 - 1989/1990

P	T	Wilayah III Jumlah sapi yang diperiksa + Ba (ekor)	Lampung (ekor)(%)	Bengkulu Sum. Sel. (ekor)(%)	Keterangan
III	1979/1980	-	-	-	
	1980/1981	44	-	-	
	1981/1982	67	-	-	
	1982/1983	4	-	-	
	1983/1984	718	-	-	
IV	1984/1985	2170	-	-	
	1985/1986	131	-	-	
	1986/1987	75	-	-	
	1987/1988	6	-	-	
	1988/1989	55	-	-	
V	1989/1990	5	-	-	
	Jumlah	3275			

Sumber : Laporan Tahunan BPPH III

LAPORAN EVALUASI BPPH III DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH

Sobari

PENDAHULUAN

Sebelum konsep Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas) dikumandangkan kegiatan BPPH III semata-mata berpedoman kepada SK Mentan No. 315/1978, SK Dirjen Peternakan No. 557/1980, petunjuk-petunjuk teknis lainnya dari Dirjen Peternakan dan/atau dari Direktur Bina Kesehatan Hewan serta penyesuaian-penyesuaian dengan kegiatan Kanwil Deptan dan Dinas Peternakan wilayah setempat.

Mengenai Sistem Informasi Kesehatan Hewan (Sisinfokeswan) BPPH III mengacu kepada SK Dirjen Peternakan No. 393/1989 tentang Penetapan Penggunaan Formulir Laporan Penyakit Hewan (Surveillance). Program DIAG di BPPH III baru mulai dilaksanakan tanggal 1 April 1993 karena adanya mutasi Kepala Seksi Epidemiologi BPPH III pindah ke Jawa Tengah sebelum transfer teknologi kepada penggantinya sempurna.

KEGIATAN

Jenis kegiatan BPPH adalah rincian dari SK Mentan No. 315/1978 (yang berbunyi : pemeriksaan, penyidikan, diagnosa dan cara penanggulangan penyakit hewan) menjadi 12 jenis kegiatan yaitu (1) Pelayanan Aktif Lapangan (2) Penyidikan Penyakit (3) Pengamatan Aktif (4) Pemeriksaan Kesehatan Hewan (5) Cara-cara Penanggulangan Penyakit Hewan (6) Pembinaan Laboratorium Kesehatan Hewan (7) Latihan Tenaga Kesehatan Hewan (8) Diagnosa Penyakit Hewan (9) Penelitian Terbatas dalam rangka Pengembangan Penyidikan (10) Pemeriksaan Potensi Vaksin dan Monitoring Hasil Vaksinasi (11) Kesehatan Masyarakat Veteriner dan (12) Pemetaan Penyakit.

Makalah yang disajikan dalam Rakorwil BPPH III tgl. 29-30 Juli 1993 di Bandar Lampung
* Kepala BPPH Wilayah III Bandar Lampung

HASIL

Hasil diagnosa penyakit hewan khususnya Penyakit Hewan Menular yang Potensial Menimbulkan Kerugian Ekonomi (PHM-PMKE) selama Pelita V tertera pada tabel 1.

Mengenai saran cara penanggulangan penyakit hewan, secara kualitatif tertera pada tiap jawaban hasil pemeriksaan (model E-30-b).

Masalah non penyakit secara tajam belum pernah diidentifikasi tersendiri karena masalah pakan misalnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif akhirnya terdiagnosa sebagai **deficiency** baik **mineral** maupun **vitamin** dan **malnutrition**. Masalah non penyakit secara tajam dapat diidentifikasi melalui pengamatan aktif (*surveillance*) misalnya kegagalan IB, kegagalan mengenali tanda-tanda birahi dan lain-lainnya. Saran pemecahannya tentu saja secara kasus per kasus.

PEMBAHASAN / EVALUASI

1. Kegiatan Pelayanan Aktif Lapangan (PAL)

Menurut pengertiannya (definisinya) PAL adalah kegiatan bersama Dinas Peternakan yang meliputi **penyuluhan, pencegahan, pengobatan, pemberantasan, pengumpulan spesimen, mendiagnosa dan meningkatkan ketrampilan petugas teknis kesehatan hewan di lapangan.**

Tugas ini sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar tetapi belum sesuai dengan definisi. Tim BPPH III biasanya didampingi oleh mantri hewan atau Kasi Keswan yang statusnya tidak lebih sebagai tuan rumah yang mengantar tamu yang mengunjungi daerahnya. Mereka belum merupakan **Tim Pelayanan Aktif Lapangan** seperti yang didefinisikan. Kegiatan yang dilakukanpun biasanya hanya mengambil spesimen, kegiatan selebihnya kurang mendapat perhatian. Mengacu Siskeswannas pada Rambu **Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu (PKHT)** kiranya dapat dibentuk **Tim PKHT** yang terdiri dari unsur Dinas Peternakan yang melaksanakan penyuluhan, vaksinasi, pengobatan yang sakit dan unsur BPPH yang melaksanakan pengambilan spesimen, melatih tenaga teknis keswan

lapangan dan membuat diagnosa. Anggota Tim PKHT ini harus berkoordinasi dari mulai membuat rencana operasional sampai pelaksanaannya. Jadi tiap propinsi sudah punya Tim PKHT serta jadwal dan lokasi kunjungan ke lapangan.

2. Penyidikan Penyakit Hewan (PPH) atau Investigasi

PPH atau investigasi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk melacak segala aspek penyakit dimulai terjadinya kasus, cara mendiagnosa dan penanggulangannya.

Tugas ini sudah dijalankan dengan baik dan benar. Selama Pelita V sudah terinvestigasi letupan penyakit BEF dan Rama Dewa (1990) di propinsi Lampung, SE (1990/1991) di propinsi Sum-Sel, EDS-76 dan Scabies (1991) di propinsi Lampung, IBD atau Gumboro Disease (1992) di propinsi Lampung, Bengkulu dan Sum-Sel, Rama Dewa (1992/1993) di propinsi Lampung. Berkat kerja sama yang baik antara Dinas Peternakan dengan BPPH III, letupan penyakit tersebut segera dapat ditanggulangi sehingga gagal untuk menjadi wabah besar (pageblog).

3. Pengamatan Atif (PA) atau Surveillance

PA atau surveillance adalah pendataan parameter kesehatan hewan dan diagnosa laboratorik penyebabnya pada komoditi ternak tertentu, pada lokasi tertentu dan dalam waktu tertentu.

Dari surveillance yang dilaksanakan pada tahun anggaran 1992/1993 dapat diambil beberapa hasil antara lain sebagai berikut :

- (a) terjadi pertumbuhan 15,8% pada komoditi kambing di desa Pulau Tengah
- (b) terjadi pertumbuhan 21,3% pada ayam buras di desa Trikooyo
- (c) terjadi penurunan 2,8% pada ternak sapi di desa Karang Jaya
- (d) ternak yang paling banyak dijual oleh pemiliknya adalah ayam dan kambing
- (e) tingkat reproduksi yang tinggi terjadi pada kambing dan ayam jika dibandingkan dengan ternak lainnya
- (f) sebaliknya tingkat kematian yang tinggi juga pada ayam dan kambing
- (g) terjadi kecenderungan peningkatan infestasi cacing gastrointestinal pada sapi dan kerbau
- (h) pada uji serologik terdapat reaktor CRD dan Pullorum yang tinggi pada ayam
- (i) uji kekebalan terhadap ND pasca vaksinasi belum memperlihatkan hasil yang optimal
- (j) sedangkan uji Brucellosis pada sapi dan kerbau hasilnya negatif

Hasil ini belum optimal karena pada umumnya peternak cepat bosan dan ingin segera melihat atau menikmati hasilnya. Di sini perlu ada **give and take** misalnya diadakan penyuntikan vitamin atau pemberian obat cacing secara gratis dan penyuluhan. Pelaksanaan PA ini bisa juga dipadukan dengan PAL, mungkin hasilnya akan lebih baik.

4. Pemeriksaan Kesehatan Hewan (PKH)

PKH adalah pemeriksaan hewan tersangka sakit baik di lapangan maupun di BPPH dalam rangka membantu tugas-tugas Dinas Peternakan. Tugas ini dilaksanakan dengan baik karena tugas ini sebenarnya merupakan bagian dari kegiatan PAL, PPH maupun PA.

5. Cara-cara Penanggulangan Penyakit Hewan (CPPH)

CPPH adalah memberikan saran-saran dan cara-cara penanggulangan penyakit di suatu wilayah kepada Dinas Peternakan setempat, dapat berupa tulisan maupun lisan.

Tugas ini juga telah dilaksanakan dengan baik, secara tertulis selalu melekat pada Jawaban Hasil Pemeriksaan (model- E-30-b) sedangkan secara lisan diberikan di lapangan sewaktu melaksanakan PAL, PPH, PA maupun tugas lapangan lainnya.

6. Pembinaan Laboratorium Kesehatan Hewan (PLKH)

PLKH adalah kegiatan memberikan bimbingan administrasi, teknis, operasional dan peningkatan laboratorium kesehatan hewan.

Tugas ini sebenarnya bukan tugas yang berat, akan tetapi hasilnya boleh dikatakan nihil sebab yang mereka butuhkan bukan bimbingan administrasi, teknis ataupun operasional tetapi mereka membutuhkan peralatan, bahan-bahan kimia (reagen) dan bahan biologis (antigen) di mana persediaan BPPH III sendiri bukan tak terbatas.

Di wilayah BPPH III hanya ada 2 laboratorium type B yaitu satu di Bengkulu dan satu di Palembang. Kedua-duanya tidak terlalu aktif bukan karena masalah teknis tetapi mungkin karena minimnya peralatan dan biaya operasionalnya. Tidak ada laboratorium type C di wilayah BPPH III. Praktis BPPH III single fighter kecuali Pullorum test yang secara reguler dilakukan oleh laboraotium type B Palembang.

7. Latihan Tenaga Kesehatan Hewan (LTKH)

LTKH adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga dokter hewan dan teknis menengah di bidang kesehatan hewan. Tugas ini telah dilaksanakan dengan baik. Selama Pelita V 15 orang dokter hewan dan 35 paramedis, telah dilatih oleh BPPH III (2 tahun terakhir bekerja sama dengan BLPP). Selain itu setiap ada pelatihan tenaga peternakan, BPPH III selalu diminta tenaganya untuk melatih pengambilan dan pengiriman spesimen. Walaupun hasil evaluasi di ruang latihan atau laboratorium umumnya baik, namun hasil akhir yang diharapkan yaitu meningkatnya mutu maupun jumlah spesimen kiriman masih sangat memprihatinkan. Hanya spesimen Rabies yang ada peningkatan mutunya. Kalau kita lihat tabel 2, maka ternyata bahwa **spesimen kiriman** hanya 23% dan kebanyakan spesimen tersebut berasal dari propinsi Lampung (19,92%) kemudian propinsi Bengkulu (1,60%) dan terakhir adalah propinsi Sum-Sel (1,40%).

8. Diagnosa Penyakit Hewan (DPH)

DPH adalah kegiatan untuk menetapkan penyakit hewan melalui pemeriksaan spesimen yang diterima dari luar dan dari kegiatan BPPH sendiri.

Tugas ini adalah tugas pokok BPPH pada umumnya dan sekaligus juga tugas profesional dokter hewan. Oleh karena itu sangatlah wajar kalau tugas ini telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan peralatan yang dimiliki BPPH III.

Hasil kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 43 jenis PHM-PMKE yang hadir di wilayah pelayanan BPPH III ada 22 jenis. Di antara 22 jenis tersebut yang termasuk penyakit strategis adalah 10 jenis yaitu : (1) BEF, (2) MCF, (3) ND, (4) **Rabies**, (5) **Ramadewa**, (6) **Brucellosis**, (7) SE, (8) **Anaplasmosis**, (9) **Babesiosis** dan (10) **Surra**.

Dari ke 10 penyakit strategis yang pernah meletup agak serius ialah penyakit SE (1990/1991) di propinsi Sum-Sel yang menyebabkan kematian cukup tinggi. Kejadian tersebut memang di luar ramalan wabah. Untuk tahun 1993-1995 wabah SE diramalkan akan terjadi di propinsi Lampung dan Bengkulu. Oleh karena itu pengamatan dan kewaspadaan dini perlu ditingkatkan untuk menggagalkan ramalan tersebut.

9. Penelitian Terbatas dalam rangka Pengembangan Penyidikan (PTPP)

PTPP adalah kegiatan-kegiatan dalam rangka menemukan sebab-sebab dan cara-cara menanggulangi dengan cepat dan tepat dari suatu kasus penyakit di suatu wilayah (contoh : di BPPH VII pernah diadakan penelitian sangat terbatas mengenai keracunan *Lantana camara* dan di BPPH IV penelitian penyakit Jembrana).

Di BPPH III dalam Pelita V ada penelitian sangat terbatas yang sedang berjalan yaitu untuk mengetahui berapa lama titer antibody terhadap penyakit Ramadewa bisa dideteksi. Menurut hasil penelitian BCDIU bertahan sampai 2 tahun. Sampai saat ini PTPP baru berjalan selama 6 bulan.

10. Pemeriksaan Potensi Vaksin dan Monitoring Hasil Vaksinasi (PPV dan MHV)

PPV dan MHV adalah kegiatan untuk mengadakan uji vaksin yang beredar di daerah (wilayah kerja) dan mengetahui hasil guna vaksin setelah diinokulasikan ke dalam tubuh hewan melalui uji serologik.

Tugas PPV diberikan sebelum BPMSOH operasional dan adanya kecurigaan terhadap manipulasi mutu vaksin buatan Pusvetma. Sekarang setelah BPMSOH berfungsi dan biaya pengujian potensi vaksin juga termasuk mahal maka tugas tersebut tidak dilaksanakan lagi oleh BPPH III. Sedangkan monitoring hasil vaksinasi ND tetap dilaksanakan dan bahkan akan dilanjutkan dengan hasil vaksinasi Rabies dan SE. Pengambilan spesimen untuk monitoring hasil vaksinasi juga sebaiknya dipadukan dengan PKHT lainnya.

11. Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Kesmavet adalah tugas membantu Dinas Peternakan dalam melakukan pemeriksaan bahan makanan asal hewan, bahan makanan olahan asal hewan, bahan asal hewan lainnya dan penentuan diagnosa penyakit zoonosis.

Tugas ini sudah dilakukan tetapi baru berupa pelayanan pasif artinya menurut permintaan dinas. Walaupun sama-sama pelayanan pasif, tetapi permintaan pemeriksaan spesimen

Rabies sudah sangat rutin. Sementara itu untuk menyiapkan diri dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap adanya residu dalam bahan makanan asal hewan BPPH III sedang mengusulkan pengadaan alat chromatography dan melatih tenaga trampilnya ke BPMSOH.

12. Pemetaan Penyakit Hewan (PPH)

PPH adalah suatu usaha untuk menggambarkan situasi penyakit di suatu wilayah dihubungkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tersebut.

Tiap tahun dibuat peta penyakit hewan dari wilayah pelayanan BPPH III dan dikirimkan ke Direktorat Bina Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan Propinsi Dati I se Indonesia, 6 BPPH lainnya, Balitvet, Pusvetma dan 5 FKH yang ada di Indonesia.

Mutu PPH ini memang masih perlu ditingkatkan karena baru merupakan peta kasus di samping itu diagnosa yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Tingkat I, II maupun Kecamatan dan Labkeswan Type B yang tidak dikonformasikan ke BPPH III tidak trwakili dalam PPH ini.

Hasil-hasil kegiatan tersebut di atas dilaporkan setiap bulan dalam formulir E-28 dan E-29 kepada Dirjen Peternakan c.q. Direktur Bina Kesehatan Hewan dan tembusan kepada Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I se wilayah pelayanan BPPH III, sesuai dengan SK Dirjen Peternakan No. 393/1989.

Lain dari pada itu kasus-kasus penting ditulis dan dilaporkan dalam bentuk laporan kasus yang disebarakan melalui VELABO atau pertemuan-pertemuan ilmiah yang relevan. Di samping VELABO yaitu bulletin BPPH III yang diterbitkan tiap 3 bulan sekali sumber informasi lain adalah PPH dan Laporan Tahunan BPPH III. Kekurangan dari PPH maupun Laporan Tahunan BPPH III terutama karena tidak adanya tembusan laporan penyakit baik dari Dinas Peternakan maupun dari Labkeswan type B, ke BPPH III. Diakui memang tidak ada peraturan yang mengharuskan agar Dinas Peternakan menembuskan laporan diagnosanya ke BPPH tapi demi operasionalnya Sisinfokeswannas secara regional maka hal itu seyogyanya dilaksanakan.

Tabel 1. Diagnosa Penyakit Hewan Menular yang Potensial dalam Menimbulkan Kerugian Ekonomi (PHM - PMKE) oleh BPPH III periode 1 April 1989 sampai dengan 30 Juni 1993

		J u m l a h k a s u s															
No.	Kasus yang terdiagnosa	L a m p u n g					B e n g k u l u					S u m - S e l					Jumlah / BPPH III
		V1	V2	V3	V4	V5	V1	V2	V3	V4	V5	V1	V2	V3	V4	V5	
1.	B E F	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2.	E B L	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	
3.	Fowl Pox	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
4.	Gumboro Disease	-	-	2	11	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	19	
5.	Marek's Disease	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
6.	H C F	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	
7.	N D	24	32	4	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73	
8.	O r f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
9.	Rabies	32	20	28	49	11	114	73	79	91	25	29	35	65	51	715	
10.	Rana Dewa	-	7	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	
11.	Brucellosis	2	5	24	7	-	3	-	2	-	-	-	-	-	7	50	
12.	C R D	650	849	838	1086	523	-	-	413	-	-	-	-	-	398	4757	
13.	Pullorum	98	537	499	835	102	-	-	413	-	-	-	-	-	330	2814	
14.	S E	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	9	
15.	Anaplasmosis	3	4	10	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	21	
16.	Babesiosis	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
17.	Surra	10	12	9	11	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	48	
18.	Theileriasis	21	46	22	7	-	4	12	29	2	-	-	-	1	-	144	
19.	Coccidiosis	118	95	158	137	103	5	-	12	46	-	-	-	6	23	703	
20.	Fasciolosis	190	246	107	145	3	2	1	20	6	-	-	1	118	23	864	
21.	Nematodiasis	568	607	618	629	125	10	42	87	144	-	-	23	79	64	2996	
22.	Scabies	3	25	24	6	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	68	
23.	E D S - 76	-	4	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
24.	L L	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
25.	Colibacillosis	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
26.	Leucocytozoonosis	7	11	17	6	39	1	-	16	-	-	-	-	25	-	122	
27.	Aspergillosis	2	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
28.	Paramphistomiasis	806	531	478	511	87	22	8	53	67	-	-	16	330	46	2955	
J u m l a h		2537	3045	2863	3507	1012	165	140	1128	360	25	30	80	601	971	16479	

Keterangan :

V1 = 1989 / 1990

V2 = 1990 / 1991

V3 = 1991 / 1992

V4 = 1992 / 1993

V5 = 1993 / 1994

No. 23 - 28 tidak termasuk PHM - PMKE

KESIMPULAN

1. PAL atau **active service** belum dijalankan sesuai dengan SK Dirjen Peternakan No. 557/1980 maupun Siskeswannas.
2. PA sudah dilaksanakan, tetapi hasil konkrit belum dapat dirasakan peternak, sementara peternak sudah mulai bosan.
3. PLKH tidak berjalan sempurna. Mereka lebih membutuhkan bantuan peralatan dan dana operasional demikian sehingga pembinaan administrasi, teknis dan operasional dirasakan kurang bermanfaat oleh mereka.
4. DPH yang merupakan tugas pokok BPPH sekaligus tugas profesional dokter hewan telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Namun diakui beberapa diantaranya masih makan waktu terlalu lama apalagi kalau harus merujuk ke laboratorium lain.
5. PTPP tidak banyak dilakukan di BPPH III yang sedang berjalan adalah memantau antibody penyakit Ramadewa selama 2 tahun, sampai saat ini baru berjalan 6 bulan.
6. MHV baru dilaksanakan terhadap vaksin ND, sedangkan terhadap hasil vaksinasi Rabies dan SE belum.
7. Kesmavet dilaksanakan baru kalau ada permintaan Dinas Peternakan. Akan disiapkan tenaga terampil dan peralatan untuk pemeriksaan residu.
8. LTKH hasilnya baru nampak pada peningkatan mutu spesimen Rabies saja, spesimen lain masih tetap rendah baik mutu maupun jumlahnya.
9. PPH telah dibuat setiap tahun tetapi belum lengkap karena diagnosa penyakit yang dibuat oleh laboratorium type B (kecuali Pullorum Test) dan Dinas Peternakan terkait tidak ditembuskan ke BPPH III.

SARAN

1. Agar dibentuk Tim Pelayanan Aktif Lapangan (TPAL) atau Tim Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu (TPKHT) yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur penyuluhan dan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan Tingkat I tiap propinsi dan unsur laboratorik serta epidemiologik dari BPPH. Tim ini harus berkoordinasi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan.
2. Untuk mencegah kebosanan dari para peternak sampel dalam surveillance harus ada pendekatan give and take misalnya dengan pengobatan cuma-cuma dengan memberikan obat cacing dan vitamin ternak yang kurus.
3. BPPH III tidak dapat membantu baik peralatan, reagen maupun antigen apalagi dana operasional kepada Labkeswan type B. Oleh karena itu dengan ini diteruskan kepada Kepala Dinas Peternakan Tingkat I masing-masing, bagaimana supaya Labkeswan type B di wilayah BPPH III yang hanya 2 buah ini berfungsi optimal.
4. BPPH III agar meningkatkan manajemen spesimennya demikian sehingga jawaban hasil pemeriksaan tidak terlalu lama sampai kepada si pengirim.
5. BPPH III supaya melaksanakan monitoring hasil vaksinasi Rabies dan SE, jangan hanya ND saja.
6. BPPH III supaya segera melengkapi diri dengan chromatography dan tenaga trampilnya untuk dapat segera melakukan pemeriksaan residu.
7. Labkeswan type B Bengkulu dan Palembang seyogyanya melaksanakan SK Dirjen Peternakan No. 393/1989 dan seruan Bapak Direktur Bina Kesrhjatan Hewan melalui suratnya No. TN. 150/308/DKH/03.92 tanggal 31 Maret 1992 perihal tembusan laporan ke BPPH dalam rangka memantapkan Sistem Informasi Wilayah.
8. Dimohon bantuan Kadispet Tk. I se wilayah BPPH III berkenan memotivasi para petugas kesehatan hewan lapangan agar maningkatkan jumlah maupun mutu kiriman spesimen ke BPPH III agar perbandingan spesimen kiriman dan spesimen yang diambil sendiri oleh BPPH III seimbang dan proporsional dengan demikian maka PPH yang dibuat BPPH III lebih bermakna lagi.

Tabel 2. Jumlah Spesimen per 1 April 1989 sampai dengan 30 Juni 1993

Tahun	Lampung			Bengkulu			Sumatera Selatan			BKK II	Jumlah		
	Kiriman	Aktive	Jumlah	Kiriman	Aktive	Jumlah	Kiriman	Aktive	Jumlah		Kiriman	Aktive	Jumlah
	Service			Service			Service				Service		
1989/1990	1.340	6.994	8.334	342	434	776	99	-	99	18.570	1.781	7.428	27.779
1990/1991	2.586	5.133	7.719	137	394	531	162	156	318	5.008	2.885	5.683	13.576
1991/1992	2.776	8.677	11.453	545	2.125	2.670	561	2.122	2.683	8.260	3.882	12.924	25.066
1992/1993	11.879	8.502	20.381	458	1.111	1.569	489	2.576	3.065	-	12.826	12.189	25.015
1993/1994	477	3.666	4.143	54	-	54	37	-	37	-	568	3.666	4234
Jumlah	19.058	32.972	52.030	1.536	4.064	5.600	1.348	4.854	6.202	31.838	21.942	41.890	95.670
(%)	19,92	34,40		1,6	4,25		1,40	5,1		33,30	23	43,7	100